

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
INTISARI	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
E. Keaslian Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	31
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang	31
1. Pengertian tindak pidana perdagangan orang	31
2. Subyek tindak pidana perdagangan orang	34
3. Penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana perdagangan orang ...	37
4. Sanksi tindak pidana perdagangan orang	39
B. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Kriminal	43
1. Pengertian dan ruang lingkup kebijakan kriminal	43
2. Bekerjanya kebijakan kriminal dan hubungannya dengan kebijakan sosial	47
C. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Non Penal	52
BAB III METODE PENELITIAN	58
A. Jenis Penelitian	58
B. Bahan Penelitian	62

C. Cara dan Alat Memperoleh Data.....	66
D. Lokasi dan Subjek Penelitian	67
E. Jalannya Penelitian.....	69
F. Analisis Data	70
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	74
A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Upaya Non Penal dalam Penanggulangannya di Kabupaten Lombok Barat.....	74
1. Profil Kabupaten Lombok Barat.....	74
2. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Lombok Barat.....	90
3. Upaya Non Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Lombok Barat.....	126
a. Peran Instansi pemerintah dalam Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Lombok Barat	126
b. Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Keluarga.....	141
B. Upaya Non Penal yang Akan Datang dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Lombok Barat	145
1. Keluarga atau Orang Tua Tidak Mudah Memberikan Ijin Bekerja ke Luar Negeri Melalui PJTKI Piktif	146
2. Keluarga atau Orang Tua Harus Dengan Tegas Menghindari Anak dari Praktik Pernikahan Dini.....	147
3. Tingkat Pendidikan Anak Tidak Boleh Dibedakan Antara Anak Laki- laki Dengan Perempuan di dalam Keluarga.....	148
4. Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Lebih Banyak Melibatkan Partisipasi Masyarakat	151
5. Pemerintah Seharusnya Membentuk Pos Tenaga Kerja (Posnaker) di Tiap-tiap Desa.....	154
6. Perlu Adanya Kebijakan Khusus tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Tingkat Kabupaten	157

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 162

A. Kesimpulan 162

B. Saran..... 163

DAFTAR PUSTAKA 165

LAMPIRAN:

1. Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 457/773/DISNAKER/2018
2. Grafik Jenis Kasus PMI
3. Daftar Nama Korban di RPTC Dinas Sosial Lombok Barat